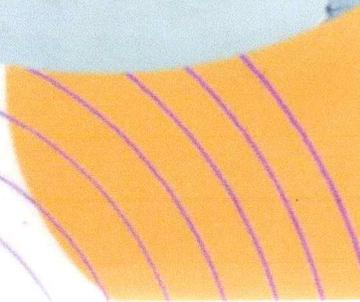
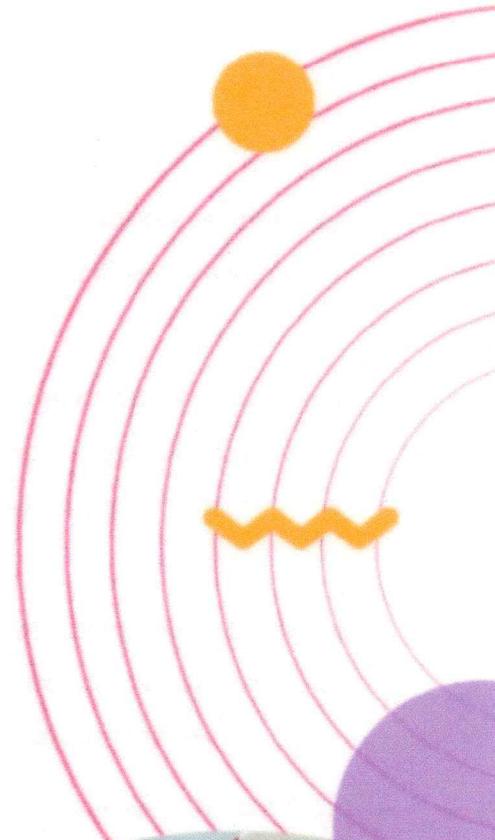


Renja Perubahan

2020

DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN
DESA

KABUPATEN LUWU TIMUR



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa oleh karena berkat rahmat, taufik dan hidayahNya sehingga Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 dapat diselesaikan dengan baik.

Renja-P ini disusun untuk memenuhi kewajiban instansi dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sesuai Peraturan Menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tahapan , tata cara penyusunan , pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Renja ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam Renja-P ini belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari berbagai kekurangan , karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan Renja dimasa yang akan datang

Ucapan terimakasih kepada tim yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Renja-P Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2020 ini. Terimakasih



Majili, Agustus 2020
KEPALA DINAS,

HALSEN, S.IP,MM
Pangkat : Pembina TK I /IVb
NIP. 19720424 199203 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Bab I Pendahuluan	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat SKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2020.....	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	34
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah	36
2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD	38
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat.....	53
Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan perangkat daerah	
3.1. Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD	54
3.2. Program dan Kegiatan	54
Bab IV Penutup.....	88

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan serta kebutuhan anggaran anggaran indikatif kegiatan. Penyusunan Renja merupakan salah satu rangkaian tahapan perencanaan pembangunan setelah tersusunnya RPJMD, RENSTRA Perangkat Daerah dan Rancangan awal RKPD. Dalam penyusunan renja perangkat Daerah dilakukan pengkajian program dan kegiatan yang tertuang dalam rancangan awal RKPD dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja pada tahun sebelumnya, pencapaian target RENSTRA, usulan dari masyarakat/pemangku kepentingan, serta analisis kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan permendagri nomor 86 tahun 2017 terdapat 2 (dua) tahapan dalam melakukan perubahan renja perangkat daerah yaitu tahap penyusunan rancangan perubahan dan penyusunan rancangan akhir perubahan rencana kerja perangkat daerah. Penyusunan perubahan Renja mengacu pada rancangan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun berjalan

Dengan adanya perubahan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020, maka berdampak pada perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dimana harus Menyusun perubahan rencana kerja tahun 2020. Dokumen perubahan RENJA merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020, perubahan RENJA disesuaikan agar dapat mendukung percepatan pencapaian target tujuan perangkat daerah.

Selanjutnya perubahan RENJA perangkat daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah dan kemudian berubah

menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) melalui penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P)

1.2 LANDASAN HUKUM

Rencana Kerja Perubahan (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Luwu Timur tahun 2020 disusun mengacu pada landasan hukum yang digunakan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114)
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);

20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2015-2019)(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan daerah nomor 10 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 ;
26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009, Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010, Nomor 2)
28. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembar Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 7);

30. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 10 tahun 2013 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah propinsi sulawesi selatan tahun 2013-2018;
31. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur ;
32. Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas dan Jabatan Struktural pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur.
33. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembar Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5);
34. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020(Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun anggaran 2019 Nomor 41)

1.3 Maksud dan Tujuan

- **Maksud**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 adalah sebagai pedoman dan arah di dalam pelaksanaan program/kegiatan tahun 2020 bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang telah mengalami perubahan, baik berupa penambahan/pengurangan kegiatan serta penambahan/pengurangan target kinerja sesuai dengan evaluasi hasil kinerja hingga Triwulan II Tahun 2020.

- **Tujuan**

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020 adalah :

- 1) Sebagai pengendali kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa agar terarah dan sesuai dengan visi, misi, strategi, kebijakan dan program yang telah ditetapkan.
- 2) Tercapainya sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan.
- 3) Terwujudnya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan arah yang terpadu dengan strategi yang tepat dan terukur.
- 4) Sebagai pedoman penyusunan kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- 5) Sebagai dasar dalam mengevaluasi kinerja kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

1.4 Sistematika Penulisan RENJA

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD S.D TW II TAHUN 2020

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa sampai dengan Triwulan II dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
- 2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan sasaran Renja Tahun 2020

3.2 Program dan Kegiatan

BAB IV

PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD dan capaian renstra SKPD

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab.Luw Timur menetapkan Sasaran yang ditetapkan dalam RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun anggaran 2016 – 2021, dijabarkan pula Indikator Kinerja yang mengacu pada Tujuan Sasaran RPJMD seperti terlihat pada **(Tabel 2.1)**

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Mewujudkan Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Desa dalam Pembangunan	Cakupan Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan dan Desa			-	-	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%
			Meningkatnya Partisipasi Lembaga Masyarakat dan	Cakupan Lembaga	-	-	75,00%	80,00%	83,00%	85,00%

			Lembaga Ekonomi Desa	Masyarakat yang aktif						
				Cakupan Lembaga Ekonomi yang Sehat	-	-	60,00%	70,00%	75,00%	80,00%
			Meningkatnya Kualitas keberdayaan desa	Persentase Desa Berkembang	-	-	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%
2	Mewujudkan kinerja Kinerja Pelayanan OPD yang efektif, efisien dan Akuntabel	Nilai Lakip	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Jumlah Score LAKIP	55	57	58	60	65	70

Secara Umum evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2020 dilakukan dengan cara mengkaji antar target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja sasaran yang hendak dicapai dengan realisasi kinerja SKPD. Selanjutnya dilakukan analisi terhadap penyebab terjadinya celah kinerja yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Hal ini bermanfaat dalam memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana suatu organisasi telah terwujudkan misi yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab.Luwu Timur Tahun 2020 secara umum selaras dengan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, begitupun pada Renja Perubahan Tahun ini. Pada Renja Perubahan ini ada beberapa kegiatan yang mengalami perubahan anggaran baik itu dengan pergeseran anggaran maupun yang mengalami penambahan anggaran. Adapun secara rinci evaluasi perencanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Luwu timur 2020 sampai triwulan II diuraikan dalam tabel berikut ini : (tabel evaluasi RKPD s.d TW2)

Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2020
TRIWULAN II
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No	Sasaran RKPD	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi								Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	
				Target RPJMD		Realisasi		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																			
		Penyediaan jasa surat	Jumlah surat masuk dan					171	900,000	429	210,000	429	210,000	429	-	-	-	858	210,000	49.97%	23.33%

		menyura t	surat keluar yang diagend akan (surat)																
		Penyedia an jasa komunik asi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Rekenin g Bulanan Jasa Komunik asi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Terbayar kan (Rek)					36	60,200,000	9	10,963,221	9	15,453,1 18	-	-	18	26,416,339	50.00%	43.88%
		Penyedia an jasa kebersih an kantor	Jumlah Tenaga Kebersih an Kantor yang terbayar kan (Org)					2	51,375,000	2	4,990,750	2	4,000,00 0	-	-	4	8,990,750	200.00%	17.50%

		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang dipelihara (unit)					33	7,350,000	8	885,000	14	-	-	-	22	885,000	66.67%	12.04%
		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang disediakan (jenis)					27	26,603,000	19	4,697,000	15	-	-	-	34	4,697,000	125.93%	17.66%
		Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah Barang Cetak dan Pengadaan yang tersedia (Jenis)					6	13,170,000	5	4,115,000	3	-	-	-	8	4,115,000	133.33%	31.25%
		Penyediaan komponen instalasi listrik/pekerjaan	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor					58	2,500,000	-	-	8	-	-	-	8	-	13.79%	0.00%

		bangunan kantor	yang tersedia (buah)																
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang disediakan (eks)					60	6,180,000	8	1,020,000	25	1,020,000	-	-	33	2,040,000	55.00%	33.01%
		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makanan dan Minuman yang tersedia (ktk)					946	12,920,000	232	3,198,800	180	-	-	-	412	3,198,800	43.55%	24.76%
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah Koordinasi dan konsultasi Luar daerah					61	269,480,000	13	38,331,000	24	50,355,574	-	-	37	88,686,574	60.66%	32.91%

		si ke luar daerah	yang dilaksanakan akan (kali)																
		Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis	Jumlah Tenaga Pendukung administrasi/teknis yang terbayarkan (Org)					18	234,000,000	18	39,000,000	18	58,500,000	-	-	18	97,500,000	100.00%	41.67%
		Monitoring dan evaluasi	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi (Dok)					4	148,213,000	1	7,650,000	1	59,490,000	-	-	2	67,140,000	50.00%	45.30%
		Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang dilaksanakan akan (kali)					240	54,096,000	60	13,341,200	53	13,167,400	-	-	113	26,508,600	47.08%	49.00%

							886,987,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								78.43%	37.25%	
								Predikat Kinerja								Tinggi	Sangat Rendah	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur														6,572,130	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (unit)				26	41,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara (gedung)				1	33,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%

		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional yang diadakan (15)	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan (15)				0	39,900,000	8	4,963,130	3	1,609,000	-	-	6	6,572,130	0.00%	16.47%
							114,700,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0.00%	5.73%	
								Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur														-	#DIV/0!	#DIV/0!
		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek, diklat, workshop, seminar perundang-				19	35,239,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%

			ng- undangan (org)																	
								35,239,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0.00%	0.00%		
									Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah		
		Program Peningka tan Pengem bangan Sistem Pelapora n Capaian Kinerja dan Keuanga n																3,951,000	#DIV/0!	#DIV/0!
		Penyusu nan laporan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi	Jumlah laporan Akuntabi litas Kinerja Instansi Pemerin tah yang					1	3,951,000	1	3,951,000	-	-	-	-		1	3,951,000	50.00%	100.00%

		kinerja SKPD	disusun (Dok)																
							3,951,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										50.00%	100.00%
								Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Tinggi
		Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD															5,421,000	#DIV/0!	#DIV/0!
		Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang disusun (Dok)				5	8,458,000	1	2,098,000	2	3,323,000	0	-	-	3	5,421,000	60.00%	64.09%

									8,458,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						60.00%	64.09%			
										Predikat Kinerja						Rendah	Rendah			
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																				
		Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan													3,040,000	#DIV/0!	#DIV/0!			
		Pendam pingan P2MP	Jumlah desa yang dilakukan Pendampingan dan Evaluasi (desa)						99	26,921,000	-	-	8	2,250,000	-	-	8	2,250,000	8.08%	8.36%
		Pendam pingan Teknis dan Akses Pengawasan Badan usaha	Jumlah desa yang mendapatkan pendampingan teknis dan						124	11,380,000	-	-	2	790,000	-	-	2	790,000	1.61%	6.94%

		Milik Desa	akses pemasaran bumdesa (desa)																
							38,301,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										6.16%	7.94%
								Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah
		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa															201,485,500	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Jumlah aparatur pemerintah Desa yang mengikuti pelatihan dalam bidang manajemen				45	203,236,000	45	192,075,500	-	9,410,000	-	-		45	201,485,500	100.00%	99.14%

			pemerintah Desa (Org)																	
							203,236,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	99.14%	
								Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
		Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan																27,104,544	#DIV/0!	#DIV/0!
		Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan keluarga	Jumlah Kelompok PKK Yang Dimonitoring dan Dievaluasi (klp)				139	266,564,000	-	6,845,000	-	11,136,644	-	-	-			17,981,644	0.00%	6.75%
		Peningkatan derajat pendidikan	Jumlah kelompok PKK yang				139	79,650,000	-	-	-	1,350,000	-	-	-			1,350,000	0.00%	1.69%

		an dan keterampilan perempuan dan keluarga	mendapatkan pelatihan dan pendidikan (klp)																
		Monitoring evaluasi dan pembinaan kelembagaan kesejahteraan keluarga	jumlah kelompok PKK yang dimonitoring dan dievaluasi (klp)				139	44,006,000	-	-	-	7,772,900	-	-	-	7,772,900	0.00%	17.66%	
							390,220,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.00%	6.95%
																Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah
		Program Penataan Wilayah Desa														24,345,800	#DIV/0!	#DIV/0!	

		Penyelenggaraan Pemekaran Desa	Jumlah desa persiapan (Desa)				1	83,826,200	1	17,255,800	1	2,210,000	-	-	1	19,465,800	100.00%	23.22%
		Pelaksanaan Lomba Desa	Jumlah Desa Yang Mengikuti Lomba Desa Tingkat Provinsi (Desa)				1	2,100,000	-	2,100,000	-	-	-	-	-	2,100,000	0.00%	100.00%
		Seleksi Perangkat Desa	Jumlah Desa Yang Melaksanakan Seleksi Perangkat Desa (Desa)				15	18,533,800	2	2,290,000	4	490,000	-	-	6	2,780,000	40.00%	15.00%
								104,460,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								87.34%	23.31%
									Predikat Kinerja								Tinggi	Sangat Rendah
		Program Pembinaan dan Pengawa														48,249,600	#DIV/0!	#DIV/0!

		san Penyelen ggaraan Administ rasi Pemerint ahan Desa																	
		Pendam pingan Penyusu nan Perencan aan Tahunan Desa (RKP Desa)	Jumlah Desa Yang Menyus un Perenca naan Tahunan Desa (RKP Desa) Tepat Waktu (desa)				124	38,804,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
		Pendam pingan Penyusu nan Pelaksan aan Kegiatan Desa	Jumlah Desa Yang Membua t LKPPD dan LKPJ Desa Tepat				124	13,700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%

		(LKPPD dan LKPJ Desa)	Waktu (desa)															
		Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Desa	Jumlah Rapat Koordinasi Yang Dilakukan (Desa)				124	25,534,800	31	1,663,200	-	-	-	-	31	1,663,200	25.00%	6.51%
		Penyusunan Peraturan Desa	Jumlah Peraturan-Peraturan Daerah Yang Ditetapkan Terkait Tentang Desa (Dok)				5	116,633,600	2	13,998,400	-	-	-	-	2	13,998,400	40.00%	12.00%
		Pendampingan Penyusunan RPMJDesa	jumlah desa yang menyusun RPJMDesa tepat				46	55,593,800	-	6,843,000	16	25,745,000	-	-	16	32,588,000	34.78%	58.62%

			waktu (Desa)																	
								250,266,600	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								28.92%	19.28%		
									Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah		
		Program Peningkatan dan Pemanfaatan SDA																4,282,000	#DIV/0!	#DIV/0!
		Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna	jumlah kelompok teknologi tepat guna yang mengikuti lomba (Klp)					11	4,774,000	-	1,562,000	-	2,720,000	-	-	-		4,282,000	0.00%	89.69%
								4,774,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0.00%	89.69%		
									Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Tinggi		
		Fungsi Lain sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan/Fungsi Penunjang																		

		Pelaksanaan Posyandu	Jumlah Posyandu Yang Mendapatkan Pembinaan (klp)					139		20							20		14.39%	
		Rapat Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa Dengan Pemerintah	Jumlah Rapat Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa Yang Dilaksanakan (kali)					2	17,284,200	-	-	1	-	-	-		1	-	50.00%	0.00%
		Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan	Jumlah lembaga aktif (lembaga)					248	40,308,000	-	-	-	4,608,000	-	-		-	4,608,000	0.00%	11.43%
								154,097,800	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										9.82%	23.79%

Pada Tahun 2020 terdapat 12 program dan 39 kegiatan yang dijabarkan secara rinci sebagai berikut :

- **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Pada program ini terdiri atas 13 (Tiga Belas) kegiatan yakni Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik, Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Makan Minum, Penyediaan ATK, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan, Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah, Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis, Monitoring Dan Evaluasi, dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah. Adapun pagu anggaran pada program ini sebesar Rp 886.987.000,- Pada indikator evaluasi sampai dengan triwulan II rata-rata capaian kinerja untuk target kinerja **100%** (tinggi) sedangkan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar Rp 330.388.063,- dari pagu Rp 886.987.000, - atau sebesar **59,48 (sedang)**. Untuk sampai dengan triwulan II, realisasi anggaran sedang. Untuk Kegiatan Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja, Kegiatan Penyediaan ATK, Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi Listrik dan Kegiatan Penyediaan Barang cetak dan penggandaan, Kegiatan Penyediaan Jasa surat menyurat dan kegiatan penyediaan makan minum sudah terealisasi kinerjanya namun anggaran belum teralisasi karena masih dalam proses pertanggungjawaban anggaran.

- **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Pada program ini terdiri atas 3 (Tiga) kegiatan yakni Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor, Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional. Adapun pagu anggaran pada program ini sebesar Rp 114.700.000,-. Pada indikator evaluasi sampai dengan triwulan II rata-rata capaian kinerja untuk target kinerja **66,67%** (sedang) sedangkan realisasi anggaran telah terealisasi sebesar Rp 6.572.130,- dari pagu Rp 114.700.000,- atau sebesar **9,77 (rendah)**. Sampai dengan triwulan II, beberapa kegiatan masih rendah serapan anggarannya dikarenakan masih proses pengadaan Barang dan jasa, dan pertanggungjawaban kegiatan sementara dalam proses GU.

- **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Pada program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan yakni Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan. Adapun pagu anggaran pada program ini sebesar Rp

35.239.000,-. Pada indikator evaluasi sampai dengan triwulan II rata-rata capaian kinerja untuk target kinerja **0%** (buruk) sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp 0,- dari pagu Rp 35.239.000, - atau sebesar 0 % (buruk). Sampai dengan triwulan II, realisasi anggaran pada kegiatan ini masih sangat rendah karena kegiatan bersifat disediakan dan disebabkan penundaan kegiatan Bimbingan teknis dalam rangka penanggulangan penyebaran covid-19.

- **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

Pada program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan yakni Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Adapun pagu anggaran pada program ini sebesar Rp 3.951.000,-. Pada indikator evaluasi sampai dengan triwulan II rata-rata capaian kinerja untuk target kinerja 100% (sangat tinggi) sedangkan realisasi anggaran telah terealisasi sebesar Rp 3.951.000 dari pagu Rp 3.951.000, - atau sebesar 100% (tinggi).

- **Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD**

Pada program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan yakni Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran SKPD. Adapun pagu anggaran pada program ini sebesar Rp 8.458.000,-. Pada indikator evaluasi sampai dengan triwulan II rata-rata capaian kinerja untuk target kinerja **100%** (sangat tinggi) sedangkan realisasi anggaran telah terealisasi sebesar Rp 5.421.000,- dari pagu Rp 8.458.000,- atau sebesar 75,73% (tinggi).

- **Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan**

Pada program ini terdiri atas 3 (Tiga) kegiatan yakni Pendampingan P2MP, Pelatihan keterampilan manajemen Badan Usaha Milik desa dan kegiatan Pendampingan teknis dan akses memasarkan Badan Usaha Milik Desa. Adapun pagu anggaran pada program ini sebesar Rp 38.301.000,-. Pada indikator evaluasi sampai dengan triwulan II rata-rata capaian kinerja untuk target kinerja **0 %** (buruk) sedangkan realisasi anggaran telah terealisasi sebesar Rp 7.620.000,- dari pagu Rp 38.301.000, - atau sebesar 43,84% (rendah). Untuk sampai dengan triwulan II, serapan anggaran masih sangat rendah bahkan refocusing anggaran pada kegiatan Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa karen aterkait pemotongan 50% untuk penanggulangan penyebaran covid 19.

- **Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa**

Pada program ini terdiri atas 8 (Delapan) kegiatan yakni Keberlanjutan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat, Evaluasi kinerja Lembaga kemasyarakatan desa, penguatan Kapasitas kelembagaan masyarakat desa' Bimbingan Manajemen Terhadap Kader Dalam Pelaksanaan Posyandu, Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pembentukan dan Pembinaan Badan Kesejahteraan Desa (BKD) dan Badan Kerjasama Antar Desa dalam Kecamatan, kegiatan Rapat Koordinasi BPD dan Pemerintah Daerah, Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan. Adapun pagu anggaran pada program ini sebesar Rp 154.097.800,-. Pada indikator evaluasi sampai dengan triwulan II rata-rata capaian kinerja untuk target kinerja 38,65% (sangat rendah) sedangkan realisasi anggaran telah terealisasi sebesar Rp 36.661.000,- dari pagu Rp 154.097.800,- atau sebesar 32,55% (sangat rendah). Hal ini dikarenakan SPJ pada kegiatan ini belum di pertanggungjawabkan dan beberapa kegiatan yang tertunda pelaksanaannya sehubungan dengan penanggulangan penyebaran covid-19.

- **Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa**

Pada program ini terdiri atas 4 (Empat) kegiatan yakni Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan, Pelatihan Aparatur Desa dalam bidang Manajemen Pemerintahan Desa, Pelatihan Penataan Aset Desa Bagi pengurus Barang Desa, Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang Perencanaan. Adapun pagu anggaran pada program ini sebesar 203.236.000,-. Pada indikator evaluasi sampai dengan triwulan II rata-rata capaian kinerja untuk target kinerja 100% (sangat tinggi) sedangkan realisasi anggaran telah terealisasi sebesar Rp.201.485.500- dari pagu Rp 203.236.000, - atau sebesar 99,14(sangat tinggi). 3 Kegiatan lainnya ditunda dalam rangka refocusing anggaran, pemotongan 50% dalam penanggulangan penyebaran covid 19.

- **Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan**

Pada program ini terdiri atas 3 (Tiga) kegiatan yakni Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Keluarga, Peningkatan Derajat Pendidikan dan Keterampilan Perempuan dan Keluarga, dan Monitoring Evaluasi dan Pembinaan Kelembagaan Kesejahteraan Keluarga. Adapun pagu anggaran pada program ini sebesar Rp 430.220.000,-. Pada indikator evaluasi sampai dengan triwulan II rata-rata capaian kinerja untuk target kinerja 24,67% (sangat rendah) sedangkan realisasi anggaran telah terealisasi sebesar Rp 27.104.544,- dari pagu Rp 430.220.000, - atau sebesar 14,05 % (sangat rendah). Untuk sampai dengan triwulan kedua, serapan anggaran masih rendah karena SPJ pada kegiatan ini belum di pertanggungjawabkan dan beberapa kegiatan

ditunda karena larangan untuk berkumpul (rapat, pertemuan dll) dalam rangka penanggulangan penyebaran covid 19.

- **Program Penataan Wilayah Desa**

Pada program ini terdiri atas 3 (Tiga) kegiatan yakni Penyelenggaraan Pemekaran Desa, Pelaksanaan Lomba Desa dan Seleksi Perangkat Desa. Adapun pagu anggaran pada program ini sebesar Rp 104.460.000,-. Pada indikator evaluasi sampai dengan triwulan II rata-rata capaian kinerja untuk target kinerja **16,66%** (sangat rendah) sedangkan realisasi anggaran telah terealisasi sebesar Rp 24.315.800,- dari pagu Rp 104.460.000, - atau sebesar 32,85% (sangat rendah). Sampai dengan triwulan II, serapan anggaran masih rendah karena terkait kegiatan Pelaksanaan Lomba Desa dibatalkan berdasarkan surat dari Menteri Dalam Negeri Nomor 414.4/2777/SJ tentang pembatalan penyelenggaraan lomba desa dan kelurahan serta temu karya nasional dan pekan inovasi perkembangan desa dan kelurahan tahun 2020 dalam penanggulangan penyebaran Covid-19.

- **Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa**

Pada program ini terdiri atas 1 (Satu) kegiatan yakni Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa,. Adapun pagu anggaran pada program ini sebesar Rp 68.139.000,-. Pada indikator evaluasi sampai dengan triwulan II rata-rata capaian kinerja untuk target kinerja 100% (sangat tinggi) sedangkan realisasi anggaran telah terealisasi sebesar Rp 49.599.000,- dari pagu Rp68.139.000,- atau sebesar 99,00% (sangat tinggi). Untuk sampai dengan triwulan II, serapan anggaran tinggi karena adanya kondisi dan situasional yaitu pandemic Virus Corona yang mengharuskan adanya perubahan APBDesa.

- **Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**

Pada program ini terdiri atas 5 (Lima) kegiatan yakni Pendampingan Penyusunan Perencanaan Tahunan Desa (RKP Desa), Pendampingan Penyusunan Pelaksanaan Kegiatan Desa(LKPPD dan LKPJ Desa), Pendampingan Penyusunan RPJMDesa, Rapat Koordinasi Dengan Pemerintah Desa, dan Penyusunan Regulasi Tentang Desa. Adapun pagu anggaran pada program ini sebesar Rp 250.266.600,-. Pada indikator evaluasi sampai dengan triwulan II rata-rata capaian kinerja untuk target kinerja **55,11%** (cukup tinggi) sedangkan realisasi anggaran telah terealisasi sebesar Rp 48.250.400,- dari pagu Rp 250.266.600,- atau sebesar 35,28% (rendah). Untuk sampai dengan triwulan II, serapan anggaran masih rendah karena disebabkan Kegiatan Pendampingan

pelaksanaan kegiatan desa(LKPPD dan LKPJ Desa) direncanakan tahapannya pada TW 2 dengan pendampingan langsung di desa, namun karena Pandemi Virus Corona sehingga keterbatasan waktu dan anjuran dari Protokol Kesehatan untuk tidak melakukan mengumpulkan orang dalam jumlah yang banyak. Sedangkan untuk kegiatan Rapat koordinasi dengan pemerintah desa, kegiatan penyusunan regulasi tentang desa, kegiatan pendampingan penyusunan RPJMDesa telah dilaksanakan namun belum dipertanggungjawabkan.

- **Program Peningkatan dan Pemanfaatan SDA**

Pada program ini terdiri atas 3 (Tiga) kegiatan yakni Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna, Pelaksanaan Lomba Inovasi Teknologi, Expo Produk Unggulan Kawasan. Adapun pagu anggaran pada program ini sebesar Rp 4.774.000,-. Pada indikator evaluasi sampai dengan triwulan II rata-rata capaian kinerja untuk target kinerja 0% (sangat rendah) sedangkan realisasi anggaran telah terealisasi sebesar Rp 4.774.000,- dari pagu Rp 315.824.000,- Sampai dengan triwulan II, serapan anggaran masih sangat rendah karena kegiatan Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna, Kegiatan Lomba Inovasi Teknologi tepat guna, kegiatan expo produk unggulan Kawasan perdesaan ditunda berdasarkan surat dari Menteri Dalam Negeri Nomor 414.4/2777/SJ tentang pembatalan penyelenggaraan lomba desa dan kelurahan serta temu karya nasional dan pekan inovasi perkembangan desa dan kelurahan tahun 2020 dalam penanggulangan penyebaran Covid-19 dan dalam rangka refocusing anggaran dalam penanggulangan penyebaran virus Covid-19, anggaran untuk 3 kegiatan dikurangi .

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kedudukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa(DPMD) merupakan lembaga teknis daerah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bertugas membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah sebagai upaya untuk menilai/menganalisis pencapaian kinerja kegiatan secara berkala dengan membandingkan kondisi sebelumnya (\pm 5 tahun terakhir), pencapaian kinerja sasaran strategis diukur dengan membandingkan kondisi

capaian tahun 2016 sampai tahun 2020 terukur dengan kondisi tahun 2019 dengan mengacu pada indikator utama dan indikator kegiatan yang telah ditetapkan, berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Analisis kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Luwu Timur dalam menilai keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian kinerja menggunakan Indikator Kinerja Kunci sesuai dengan sasaran target yang ada dalam Renstra Tahun 2016-2021. Pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa dapat diukur dalam **tabel 2.2**

Tabel 2.2

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Luwu Timur**

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- (%)						REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI	CATATAN
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2021	ANALISIS
1	Meningkatkan partisipasi lembaga Masyarakat dan lembaga ekonomi Desa	Cakupan lembaga masyarakat yang aktif	-	-	75.00	80.00	83.00	85.00	99.57	98.35		
		Cakupan lembaga ekonomi yang sehat	-	-	60.00	70.00	75.00	80.00	99.00	88.7		
2	Meningkatnya kualitas keberdayaan desa	persentase desa berkembang			50.00	60.00	70.00	80.00	122.15	82.25		

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting yang akan dihadapi berdasar pada tugas dan fungsi perangkat Daerah Dinsa Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Rendahnya penggunaan data base Desa

Upaya menggerakkan pembangunan desa berbasis potensi local dapat diukur dari sejauh mana data sumberdaya dan potensi yang dimiliki oleh desa tersedia. Responsitas terhadap pengisian data profil dalam setiap tahunnya kurang mendapat respon positif, sehingga sulit untuk melihat perkembangan pembangunan desa secara riil. Hal ini disebabkan pola pengisian yang cenderung sama dalam pengisian data sumberdaya dan potensi desa dari tahun ke tahun. Disisi lain pengambil kebijakan di tingkat desa kurang dan hampir tidak menggunakan data base desa sebagai acuan dalam menentukan skala prioritas dan sasaran pembangunan desa.

2. Kurang berfungsinya Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

Lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan sebagai penggerak utama dalam pembangunan desa kurang bisa memotivasi dan mendorong masyarakat desa untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa, sehingga partisipasi aktif yang diharapkan melalui gotong royong maupun keswadayaan dalam masa pelaksanaan program/proyek pembangunan dan paska pelaksanaannya (pemeliharaan hasil-hasil pembangunan) kurang dimiliki Sebagian besar masyarakat perdesaan. Disisi lain kemampuan kepengurusan Lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan dalam menjalankan roda organisasi masih lemah, hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan manajemen dan tata administrasi organisasi.

3. Kurang memadainya Kondisi Infrastruktur Desa

Keberadaan sarana dan prasarana infrastruktur yang baik sangat diperlukan dalam pembangunan desa, sehingga akses informasi dan komunikasi serta distribusi barang dan jasa dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat karena semua masyarakat mempunyai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang serta maju Bersama sehingga dapat mengurangi ketimpangan antar wilayah. Pembangunan infrastruktur Desa pada dasarnya sudah berjalan dengan baik, namun perlu ditingkatkan

keberadaannya, khususnya peningkatan jalan desa dan pada lokasi tertentu sering tergenag air, sehingga usia teknisnya menjadi lebih pendek, oleh karena itu pembangunan peningkatan jalan desa harus di dahului dengan kajian teknis berupa studi kelayakan, fisik dan pembiayaan.

4. Menurunnya nilai-nilai sosial Masyarakat dan penghargaan terhadap adat dan istiadat budaya lokal

Konstruksi sosial masyarakat desa yang dulu ada, seperti : teposeliro, tolong menolong, gotong royong dan sejenisnya, mulai pudar dan menjadikan kehidupan masyarakat desa yang makin heterogen dan individualis, oleh karena itu pembinaan dan sosialisasi terhadap nilai-nilai sosial (moral) masyarakat desa melalui kegiatan-kegiatan yang menghargai adat dan istiadat budaya local setempat sangat perlu dilakukan guna peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desanya.

5. Lemahnya peran serta perempuan perdesaan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan berpartisipasi dalam pembangunan

Pengarusutamaan dan kesetaraan gender merupakan ruang terbuka bagi perempuan dalam mengambil posisi dan peran sosial kemasyarakatan serta berpartisipasi dalam pembangunan. Fikiran yang menempatkan perempuan terbatas peran sosialnya terutama di perdesaan harus diluruskan dan diberi pemahaman yang dapat melalui kegiatan dan sosialisasi pengarusutamaan dan kesetaraan gender guna berpartisipasi aktif dalam membangun desanya. Upaya ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan derajat hidup keluarga dan perlindungan perempuan serta anak.

6. Melemahnya Usaha Ekonomi Masyarakat

Peningkatan perekonomian desa melalui BUMDes, kelompok-kelompok usaha masyarakat dan sejenisnya, merupakan indikator utama dalam usaha mencapai kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya perekonomian desa mendorong stabilitas perekonomian desa pada khususnya dan perekonomian daerah pada umumnya. Ketidakstabilan perekonomian akan menyebabkan ekonomi biaya tinggi yang pada akhirnya memberikan efek terhadap tingginya pengangguran dan kemampuan daya beli masyarakat, tantangan terbesar kedepan adalah bagaimana peningkatan pertumbuhan perekonomian yang tinggi, diikuti dengan pemerataan pendapatan

dimasyarakat. Beberapa program yang sudah bergulir seperti, PNPM mandiri perdesaan

7. Kurang optimalnya pengelolaan sumberdaya desa, potensi desa dan teknologi tepat guna serta lingkungan hidup

Sumber daya desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia merupakan modal pembangunan yang harus dioptimalkan penggunaan dan pemanfaatannya, sehingga memunculkan potensi desa yang bisa dikembangkan sesuai dengan karakter local (local genius) dengan tidak meninggalkan kelestarian lingkungan sebagai penopang hajat hidup masyarakat desa dalam mencapai kesejahteraan. Upaya penggunaan dan pemanfaatan sumber daya desa, masih memiliki keterbatasan pengelolaannya, hal ini disebabkan sumber daya manusianya memiliki keterbatasan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan. Karena itu diperlukan, stimulasi dan transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi terapan, yang dapat memaksimalkan pengelolaan sumber daya, potensi dan lingkungan hidup desa, guna menopang hajat hidup masyarakat desa dalam mencapai kesejahterannya.

8. Pemerintahan yang baik

Pemerintahan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka dalam teori dan praktek administrasi public sesuai dengan perkembangan paradigma dari rule government menjadi good governance. Dalam membangun good governance bukan serta merta memperbaiki kondisi instansi pemerintah, akan tetapi lebih penting adalah persoalan etika, sikap dan perilaku. Dalam good governance tidak lagi pemerintah, tetapi juga citizen (warga negara), masyarakat dan terutama sector usaha/swasta yang berperan. Efektivitas dan efisiensi penerapan good governance dapat dilakukan melalui sinergi manajemen sector public, sektor swasta, dan masyarakat yang saling berinteraksi dan berkoordinasi. Pemerintah berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan, masyarakat berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi dan politik.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Sekretariat DPRD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2019 Hasil Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan yang disajikan dalam Lampiran **Tabel 2.4**.

TABEL 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2020

NO	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD					Catatan penting	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Terpenuhi	100	%		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Terpenuhi	100	%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar yang diagendakan	1717	Surat	2,800,000.00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar yang diagendakan	1717	Surat	900,000.00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD	Jumlah Rekening Bulanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Terbayarkan	36	rek	58,800,000.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD	Jumlah Rekening Bulanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Terbayarkan	36	rek	60,200,000.00

	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	SKPD	Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor Yang Terbayarkan	2	Org	28,000,000.00	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	SKPD	Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor Yang Terbayarkan	2	Org	43,375,000.00	
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	SKPD	Jumlah Peralatan kantoryang diperbaiki	33	Unit	12,350,000.00	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	SKPD	Jumlah Peralatan kantoryang diperbaiki	22	Unit	7,350,000.00	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	26	Jenis	28,747,000.00	Penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	26	Jenis	26,603,000.00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SKPD	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Tersedia	6	Jenis	17,850,000.00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SKPD	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Tersedia	6	Jenis	13,170,000.00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	SKPD	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	58	Buah	2,500,000.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	SKPD	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	58	Buah	2,500,000.00	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	SKPD	Jumlah Makanan dan Minuman yang tersedia	906	kotak	15,620,000.00	Penyediaan Makanan dan Minuman	SKPD	Jumlah Makanan dan Minuman yang tersedia	906	kotak	12,920,000.00	

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	SKPD	Jumlah Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	60	Exp	6,180,000.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	SKPD	Jumlah Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	60	Exp	6,180,000.00	
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	SKPD	Jumlah Koordinasi Dan Konsultasi Luar Daerah Yang Dilaksanakan	76	kali	420,915,000.00	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	SKPD	Jumlah Koordinasi Dan Konsultasi Luar Daerah Yang Dilaksanakan	52	kali	269,480,000.00	
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis	SKPD	Jumlah Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis yang Terbayarkan	18	Org	234,000,000.00	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis	SKPD	Jumlah Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis yang Terbayarkan	18	Org	234,000,000.00	
	Monitoring dan Evaluasi	SKPD	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Disusun	4	dok	35,453,000.00	Monitoring dan Evaluasi	SKPD	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Disusun	4	dok	117,481,000.00	
	Kunjungan kerja dalam daerah	SKPD	Jumlah Kunjungan Kerja Dalam Daerah yang	240	kali	54,096,000.00	Kunjungan kerja dalam daerah	SKPD	Jumlah Kunjungan Kerja Dalam Daerah yang Dilaksanakan	240	kali	54,096,000.00	

			Dilaksanakan										
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase Capaian Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Terpenuhi	100	%		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase Capaian Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Terpenuhi	100	%		
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKPD	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Diadakan	26	Jenis	120,000,000.00	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKPD	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Diadakan	6	Jenis	39,800,000.00	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	SKPD	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1	Unit	30,000,000.00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	SKPD	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1	Unit	135,000,000.00	
	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional	SKPD	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	13	Unit	54,500,000.00	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional	SKPD	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	13	Unit	39,900,000.00	

III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase Aparatur yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100	%		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase Aparatur yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100	%		
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek, Diklat, Workshop, Seminar Perundang-Undangan	19	Org	71,509,000.00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek, Diklat, Workshop, Seminar Perundang-Undangan	7	Org	35,239,000.00	
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Persentase Laporan Kinerja Dan Keuangan Yang Tersusun Tepat Waktu	100	%		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Persentase Laporan Kinerja Dan Keuangan Yang Tersusun Tepat Waktu	100	%		
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SKPD	Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Yang Disusun	1	Dok	19,715,000.00	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SKPD	Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Yang Disusun	1	Dok	3,951,000.00	

V	Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD		Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang disusun tepat waktu	100	%		Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD		Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang disusun tepat waktu	100	%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran Yang Disusun	5	Dok	10,108,000.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran Yang Disusun	5	Dok	11,189,000.00
VI	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa		Terbentuknya Lembaga Ekonomi Perdesaan yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat perdesaan	100	%		Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa		Terbentuknya Lembaga Ekonomi Perdesaan yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat perdesaan	100	%	
	Pendampingan P2MP	SKPD	Jumlah desa yang mendapatkan pendampingan dan evaluasi terkait Dana P2MP	99	Desa	53,086,000.00	Pendampingan P2MP	SKPD	Jumlah desa yang mendapatkan pendampingan dan evaluasi terkait Dana P2MP	99	Desa	26,921,000.00

	Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa	SKPD	Jumlah BumDesa yang Mengikuti Pelatihan dalam Bidang Manajemen Desa	124	Orang	162,747,000.00	Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa	SKPD	Jumlah BumDesa yang Mengikuti Pelatihan dalam Bidang Manajemen Desa	0	0	-	
	Pendampingan Teknis dan Akses Pengawasan Badan Usaha Milik Desa	SKPD	Jumlah Desa yang Mendapatkan Pendampingan Teknis dan Akses Pemasaran BumDesa	124	Bumdes	38,705,000.00	Pendampingan Teknis dan Akses Pengawasan Badan Usaha Milik Desa	SKPD	Jumlah Desa yang Mendapatkan Pendampingan Teknis dan Akses Pemasaran BumDesa	124	Bumdes	11,380,000.00	
VI	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa		Persentase Desa yang ikut berpartisipasi dalam peningkatan pembangunan desa	100	%		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa		Persentase Desa yang ikut berpartisipasi dalam peningkatan pembangunan desa	100	%		
	Keberlanjutan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat	SKPD	Jumlah desa yang menerima program pamsimas	10	Desa	54,530,400.00	Keberlanjutan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat	SKPD	Jumlah desa yang menerima program pamsimas	0	0	-	

	Evaluasi kinerja lembaga kemasyarakatan desa	SKPD	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang berprestasi dalam membangun desa	125	LKD	25,350,000.00	Evaluasi kinerja lembaga kemasyarakatan desa	SKPD	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang berprestasi dalam membangun desa	0	0	-	
	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Desa	SKPD	Jumlah Pengurus Kelembagaan Masyarakat Desa yang di tingkatkan Kapasitasnya	125	Orang	25,196,000.00	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Desa	SKPD	Jumlah Pengurus Kelembagaan Masyarakat Desa yang di tingkatkan Kapasitasnya	125	Orang	6,376,000.00	
	Bimbingan Manajemen terhadap kader dalam pelaksanaan posyandu	SKPD	Jumlah posyandu yang mendapatkan pembinaan	139	Kelompok	116,629,600.00	Bimbingan Manajemen terhadap kader dalam pelaksanaan posyandu	SKPD	Jumlah posyandu yang mendapatkan pembinaan	139	Kelompok	90,129,600.00	
	Pembentukan dan pembinaan Badan Kerjasama Antar Desa dalam Kecamatan	SKPD	Jumlah BKD dan BKAD yang dibentuk	11	Lembaga	15,220,100.00	Pembentukan dan pembinaan Badan Kerjasama Antar Desa dalam Kecamatan	SKPD	Jumlah BKD dan BKAD yang dibentuk	0	0	-	
	Peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa	SKPD	Jumlah anggota BPD yang mengikuti peningkatan kapasitas	250	Org	124,640,000.00	Peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa	SKPD	Jumlah anggota BPD yang mengikuti peningkatan kapasitas	0	0	-	

	Rapat Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa dengan pemerintah	SKPD	Jumlah rapat koordinasi BPD yang dilaksanakan	1	kali	26,285,200.00	Rapat Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa dengan pemerintah	SKPD	Jumlah rapat koordinasi BPD yang dilaksanakan	1	kali	17,284,200.00	
	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi masyarakat Perdesaan	SKPD	Jumlah Lembaga Aktif	248	Lembaga	40,308,000.00	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi masyarakat Perdesaan	SKPD	Jumlah Lembaga Aktif	248	Lembaga	40,308,000.00	
VII	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		Persentase Aparatur Desa yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	37.5	%		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		Persentase Aparatur Desa yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	37.5	%		
	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan	SKPD	Jumlah aparatur Desa yang mengikuti pelatihan bidang pembangunan kawasan perdesaan	40	org	53,970,000.00	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan	SKPD	Jumlah aparatur Desa yang mengikuti pelatihan bidang pembangunan kawasan perdesaan	0	0	-	

	pelatihan aparat pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	SKPD	jumlah aparat desa yang diberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensinya	46	org	252,011,000.00	pelatihan aparat pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	SKPD	jumlah aparat desa yang diberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensinya	46	org	203,236,000.00	
	Pelatihan Penataan Aset Desa Bagi Pengurus Barang Desa	SKPD	Jumlah Aparatur Desa yang Mengikuti Pelatihan Bidang Penataan Aset Desa	124	Orang	141,277,000.00	Pelatihan Penataan Aset Desa Bagi Pengurus Barang Desa	SKPD	Jumlah Aparatur Desa yang Mengikuti Pelatihan Bidang Penataan Aset Desa	0	0	-	
	Pelathan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Perencanaan	SKPD	Jumlah Aparatur desa yang mengikuti Pelatihan Bidang Perencanaan	124	Orang	126,848,000.00	Pelathan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Perencanaan	SKPD	Jumlah Aparatur desa yang mengikuti Pelatihan Bidang Perencanaan	0	0	-	
VIII	Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan		Persentase PKK Aktif	100	%		Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan		Persentase PKK Aktif	100	%		

	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Keluarga	SKPD	Jumlah Kelompok Pemberdayaan Keluarga sejahtera yang mendapatkan penyuluhan dan pembinaan	139	Klpk	269,564,000.00	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Keluarga	SKPD	Jumlah Kelompok Pemberdayaan Keluarga sejahtera yang mendapatkan penyuluhan dan pembinaan	139	Klpk	266,564,000.00	
	Peningkatan derajat pendidikan dan keterampilan perempuan dan keluarga	SKPD	Jumlah Kelompok Kelembagaan perempuan yang mendapatkan pelatihan dan pendidikan	139	Klpk	338,550,000.00	Peningkatan derajat pendidikan dan keterampilan perempuan dan keluarga	SKPD	Jumlah Kelompok Kelembagaan perempuan yang mendapatkan pelatihan dan pendidikan	139	Klpk	79,650,000.00	
	Monitoring Evaluasi dan pembinaan kelembagaan kesejahteraan keluarga	SKPD	Jumlah kelompok PKK yang dimonitoring dan dievaluasi	138	Klpk	56,006,000.00	Monitoring Evaluasi dan pembinaan kelembagaan kesejahteraan keluarga	SKPD	Jumlah kelompok PKK yang dimonitoring dan dievaluasi	138	Klpk	44,006,000.00	
IX	Program Penataan Wilayah Desa		Persentase desa yang baik penataan wilayah desanya	40	%		Program Penataan Wilayah Desa		Persentase desa yang baik penataan wilayah desanya	40	%		
	Penyelenggaraan Pemekaran Desa	SKPD	Jumlah Desa Persiapan	1	Desa	116,826,200.00	Penyelenggaraan Pemekaran Desa	SKPD	Jumlah Desa Persiapan	1	Desa	83,826,200.00	

	Pelaksanaan Lomba Desa	SKPD	Jumlah desa yang mengikuti Lomba Desa tingkat Provinsi	1	Desa	155,723,000.00	Pelaksanaan Lomba Desa	SKPD	Jumlah desa yang mengikuti Lomba Desa tingkat Provinsi	1	Desa	2,100,000.00	
	Seleksi Perangkat Desa	SKPD	Jumlah desa yang melaksanakan perangkat desa	15	Desa	30,033,800.00	Seleksi Perangkat Desa	SKPD	Jumlah desa yang melaksanakan perangkat desa	15	Desa	18,533,800.00	
X	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		Persentase kualitas pengelolaan keuangan desa yang baik dan tepat waktu	100	%		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		Persentase kualitas pengelolaan keuangan desa yang baik dan tepat waktu	100	%		
	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa		Jumlah desa yang tepat waktu dalam menyusun peraturan desa tentang APBDesa	124	Desa	100,204,000.00	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa		Jumlah desa yang tepat waktu dalam menyusun peraturan desa tentang APBDesa	124	Desa	49,599,000.00	
XI	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		Persentase Desa yang Tertib Administrasi	100	%		Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		Persentase Desa yang Tertib Administrasi	100	%		

	pendampingan Penyusunan Perencanaan Tahunan Desa (RKP Desa)		Jumlah Desa yang menyusun Perencanaan Tahunan Desa (RKP Desa) tepat waktu	124	Desa	60,609,400.00	pendampingan Penyusunan Perencanaan Tahunan Desa (RKP Desa)		Jumlah Desa yang menyusun Perencanaan Tahunan Desa (RKP Desa) tepat waktu	124	Desa	57,344,400.00	
	Pendampingan penyusunan Pelaksanaan Kegiatan Desa (LKPPD dan LKPJ)		Jumlah Desa yang membuat LKPPD dan LKPJ Desa Tepat waktu	124	Desa	31,086,600.00	Pendampingan penyusunan Pelaksanaan Kegiatan Desa (LKPPD dan LKPJ)		Jumlah Desa yang membuat LKPPD dan LKPJ Desa Tepat waktu	124	Desa	13,700,000.00	
	Rapat koordinasi dengan pemerintah desa		Terlaksananya rapat koordinasi antara pemerintah desa dan pemerintah kabupaten	4	kali	56,534,800.00	Rapat koordinasi dengan pemerintah desa		Terlaksananya rapat koordinasi antara pemerintah desa dan pemerintah kabupaten	4	kali	25,534,800.00	
	penyusunan Regulasi tentang desa		Jumlah peraturan-peraturan/pedoman tentang desa yang ditetapkan	5	Pdmn	154,883,600.00	penyusunan Regulasi tentang desa		Jumlah peraturan-peraturan/pedoman tentang desa yang ditetapkan	5	Pdmn	116,633,600.00	
	pendampingan penyusunan RPMJDesa		Jumlah Desa yang menyusun RPMJDesa tepat waktu	46	Desa	88,528,800.00	pendampingan penyusunan RPMJDesa		Jumlah Desa yang menyusun RPMJDesa tepat waktu	46	Desa	55,593,800.00	

XII	Program Peningkatan dan pemanfaatan SDA		Persentase Kelompok Masyarakat yang memanfaatkan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan Sumber Daya Alam	20	%		Program Peningkatan dan pemanfaatan SDA		Persentase Kelompok Masyarakat yang memanfaatkan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan Sumber Daya Alam	20	%		
	Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna		Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna yang Diikuti	1	kali	136,432,000.00	Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna		Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna yang Diikuti	0	0		-
	Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna		Jumlah Kelompok Teknologi Tepat Guna yang Mengikuti Lomba	11	Klpk	91,200,000.00	Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna		Jumlah Kelompok Teknologi Tepat Guna yang Mengikuti Lomba	0	0	4,774,000.00	
	Expo produk unggulan kawasan perdesaan		Jumlah UBK yang mengembangkan produk unggulan kawasan perdesaan	6	produk	88,191,000.00	Expo produk unggulan kawasan perdesaan		Jumlah UBK yang mengembangkan produk unggulan kawasan perdesaan	0	0		-

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tidak mendapatkan usulan Program dan kegiatan Masyarakat yang diusulkan para pemangku kepentingan , baik dari kelompok masyarakat , maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrembang (Tidak ada daftar E-Musrembang dan E-Pokir)

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Pembangunan Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur yang mengusung Visi “ *Luwu Timur terkemuka 2021*” , berarti melanjutkan pembangunan daerah menuju kabupaten Luwu Timur yang lebih maju, sejahtera dan mandiri melalui pengembangan ekonomi kerakyatan secara terpadu dan berkelanjutan yang berbasis sumber daya.

Untuk merealisasikan visi sebagaimana tersebut diatas Kabupaten Luwu Timur menjabarkannya melalui misi ke-1 yaitu : *Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis sumber daya melalui usaha pengembangan ekonomi kerakyatan untuk mencapai kesejahteraan sosial yang berkeadilan dan berkelanjutan didukung oleh stabilitas keamanan wilayah dan nilai-nilai budaya*. Dalam mewujudkan pencapaian Misi ke-1 Kabupaten Luwu Timur tersebut , maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) sesuai dengan tugas dan fungsinya Menjabarkan dalam satu Tujuan yaitu Mewujudkan Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Dan Desa dalam Pembangunan yang pencapaiannya melalui :

Sasaran Ke- 1 : Meningkatnya Partisipasi Lembaga Masyarakat dan Lembaga Ekonomi Desa

Sasaran Ke-2 : Meningkatnya Kualitas Keberdayaan Desa.

Sasaran Ke-3 : Mewujudkan Kinerja Pelayanan OPD yang efektif, efisien dan Akuntabel

3.2 PROGRAM DAN KEGIATAN

PROGRAM

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan yang nyata, sistematis, dan terpadu. Program merupakan upaya yang dilakukan untuk mengimplementasikan strategi organisasi, serta proses penentuan jumlah dan jenis sumber dana yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Luwu Timur merupakan penjabaran langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.

KEGIATAN

Rencana Kerja Perubahan (Renja) Dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa tahun 2020 meliputi 39 (Tiga Puluh Sembilan) kegiatan dalam 12 (Dua Belas) program untuk mendukung 3 (Tiga) sasaran stratejik.

Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan yang sudah berjalan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2020 terdapat 13 program yang mengalami perubahan yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
5. Program Perencanaan Dan Penganggaran SKPD
6. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
7. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
8. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
9. Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan
10. Program Penataan Wilayah Desa
11. Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
12. Program Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
13. Program Peningkatan Dan Pemanfaatan SDA

Perubahan yang dilaksanakan pada program tersebut berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran anggaran kegiatan. Kegiatan yang mengalami perubahan yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Kegiatan penyediaan surat menyurat (mengalami pengurangan sebesar Rp. 1.900.000,-) dari renja awal sebesar Rp.2.800.000,-
- Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (mengalami penambahan sebesar Rp. 1.400.000,-) dari renja awal sebesar Rp.58.800.000,-
- Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor mengalami penambahan sebesar Rp. 15.375.000,-)dari renja awal Rp. 28.000.000,-
- Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja (mengalami pengurangan sebesar Rp.5.000.000,-) dari renja awal sebesar Rp. 12.350.000,-
- Kegiatan penyediaan alat tulis kantor (mengalami pengurangan sebesar Rp.2144.000,-) dari renja awal sebesar Rp. 28.747.000,-

- Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan (mengalami pengurangan sebesar Rp. 4.680.000,-) dari renja awal sebesar Rp. 17.850.000,-
- Kegiatan penyediaan makanan dan minuman (mengalami pengurangan sebesar Rp. 2.700.000,-) dari renja awal sebesar Rp.15.620.000,-
- Kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah (mengalami pengurangan sebesar Rp. 151.435.000,-) dari renja awal sebesar Rp. 420.915.000,-
- Kegiatan monitoring dan evaluasi (mengalami penambahan sebesar Rp. 82.028.000,-) dari renja awal sebesar Rp.35.453.000,-

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

- Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (mengalami pengurangan sebesar Rp.80.200.000,-) dari Renja awal Rp. 120.000.000,-
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor (mengalami penambahan sebesar Rp.105.000.000,-) dari renja awal Rp.30.000.000,-
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan dinas/ operasional (mengalami pengurangan sebesar Rp.14.600.000,-) dari renja awal Rp. 54.500.000,-

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (mengalami pengurangan sebesar Rp.36.270.000,-) dari renja awal Rp. 71.509.000,-

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

- Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikthisar Realisasi Kinerja SKPD (mengalami pengurangan sebesar Rp.15.764.000,-) dari renja awal Rp. 19.715.000,-

5. Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD

- Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD (mengalami pengurangan sebesar Rp.1.081.000,-) dari renja awal Rp. 10.108.000,-

6. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan

- Kegiatan Pendampingan P2MP (mengalami pengurangan sebesar Rp.26.165.000,-) dari renja awal Rp. 53.086.000,-
- Kegiatan Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa (mengalami pengurangan sebesar Rp.162.747.000,-) dari renja awal Rp.162.747.000,-

- Kegiatan Pendampingan Teknis dan Akses Pengawasan Badan Usaha Milik Desa (mengalami pengurangan sebesar Rp.27.325.000,-) dari renja awal Rp.38.705.000,-

7. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun desa

- Keberlanjutan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis masyarakat (mengalami pengurangan sebesar Rp.54.530.400,-) dari renja awal Rp. 54.530.400,-
- Evaluasi Kinerja Lembaga Kemasyarakatan Desa (mengalami pengurangan sebesar Rp.25.350.000,-) dari renja awal Rp. 25.350.000,-
- Penguatan kapasitas Kelembagaan Masyarakat desa (mengalami pengurangan sebesar Rp.18.820,000,-) dari renja awal Rp. 25.196.000,-
- Bimbingan Manajemen Terhadap kader dalam pelaksanaan Posyandu (mengalami pengurangan sebesar Rp.26.500.000,-) dari renja awal Rp. 116.629.600,-
- Pembentukan dan pembinaan Badan Kerjasama Antar desa dalam kecamatan (mengalami pengurangan sebesar Rp.15.220.100,-) dari renja awal Rp. 15.220.100,-
- Peningkatan Kapasitas Badan permusyawaratan Desa (mengalami pengurangan sebesar Rp.124.640.000,-) dari renja awal Rp. 124.640.000,-
- Rapat Koordinasi Badan permusyawaratan desa Dengan pemerintah (mengalami pengurangan sebesar Rp.9.001.000,-) dari renja awal Rp. 26.285.200,-
- Pemberdayaan Lembaga Organisasi Masyarakat (mengalami pengurangan sebesar Rp.40.308.000,-) dari renja awal Rp. 40.308.000,-

8. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

- Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Kawasan Perdesaan (mengalami pengurangan sebesar Rp.53.970.000,-) dari renja awal Rp. 53.970.000,-
- Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa (mengalami pengurangan sebesar Rp.48.775.000,-) dari renja awal Rp. 252.011.000,-
- Pelatihan Penataan Asset Desa Bagi Pengurus Barang Desa (mengalami pengurangan sebesar Rp.141.277.000,-) dari renja awal Rp. 141.277.000,-
- Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Perencanaan (mengalami pengurangan sebesar Rp.126.848.000,-) dari renja awal Rp. 126.848.000,-

9. Program Peningkatan Peran perempuan Di Perdesaan

- Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan Keluarga (mengalami pengurangan sebesar Rp.3.000.000,-) dari renja awal Rp. 269.564.000,-

- Peningkatan derajat Pendidikan dan keterampilan perempuan dan keluarga (mengalami pengurangan sebesar Rp.258.900.000,-) dari renja awal Rp. 338.550.000-
- Monitoring Evaluasi dan pembinaan kelembagaan kesejahteraan keluarga (mengalami pengurangan sebesar Rp.12.000.000,-) dari renja awal Rp.56.006.000-

10. Program Penataan Wilayah desa

- Penyelenggaraan pemekaran Desa (mengalami pengurangan sebesar Rp33.000.000,-) dari renja awal Rp. 116.826.200-
- Pelaksanaan Lomba Desa (mengalami pengurangan sebesar Rp.153.623.000,-) dari renja awal Rp. 155.723.000-
- Seleksi Perangkat Desa (mengalami pengurangan sebesar Rp.11.500.000,-) dari renja awal Rp. 30.033.800,-

11. Program Pembinaan Dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa

- Evaluasi Rancangan Peraturan desa tentang APBDesa (mengalami pengurangan sebesar Rp.50.605.000,-) dari renja awal Rp. 100.204.000,-

12. Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

- Pendampingan Penyusunan Perencanaan Tahunan Desa (RKP Desa) (mengalami pengurangan sebesar Rp.3.265.000,-) dari renja awal Rp. 60.609.400-
- Pendampingan penyusunan pelaksanaan kegiatan desa (LKPPD dan LKPJ Desa) (mengalami pengurangan sebesar Rp.17.386.600,- dari renja awal Rp. 31.086.600,-
- Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Desa (mengalami pengurangan sebesar Rp.38.250.000,-) dari renja awal Rp. 154.883.600,-
- Penyusunan Regulasi Tentang Desa (mengalami pengurangan sebesar Rp.38.250.000,-) dari renja awal Rp. 154.883.600,-
- Pendampingan Penyusunan RPJMDesa (mengalami pengurangan sebesar Rp.32.935.000,-) dari renja awal Rp. 88.528.800,-

13. Program Peningkatan dan pemanfaatan SDA

- Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna (mengalami pengurangan sebesar Rp136.432.000,-) dari renja awal Rp. 136.432.000,-
- Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna (mengalami pengurangan sebesar Rp.86.426.000,-) dari renja awal Rp. 91.200.000,-
- Expo Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (mengalami pengurangan sebesar Rp.88.191.000,-) dari renja awal Rp. 88.191.000,-

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2020

KABUPATEN LUWU TIMUR

Nama : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
SKPD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)												Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a / b / c				
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																			
2.13. 2.13. 01.16	Program Penataan Wilayah Desa									355,000,000	104,460,000	(250,540,000)							

2.13.2 .13.01 .16.01	Peneg asan Batas Desa	Jumlah Desa yang memiliki Batas Desa Sesuai Ketentu an Peratura n Perunda ng- Undanga n	Jumla h Desa yang memil iki Batas Desa Sesua i Keten tuan Perat uran Perund ang- Unda ngan	-		Kabup aten, SKPD, NUHA, MALILI , WOTU, BURAU , TOWU TI, TOMO NI, MANG KUTAN A, KALAE NA, WASU POND A, ANGK ONA, TOMO NI TIMUR	Kabu pate n, SKP D, NUH A, MAL ILI, WOT U, BUR AU, TOW UTI, TOM ONI, MA NGK UTA NA, KAL AEN A, WAS UPO NDA , ANG KON A, TOM ONI TIM UR	124 Desa	124 Desa	-	-	-	Pendapata n Daerah	Pendapata n Daerah	0 De sa	-	b er ja la n	
2.13.2 .13.01 .16.06	Seleks i Peran gkat Desa	Jumlah Desa Yang Melaksa nakan Seleksi Perangk at Desa	Jumla h Desa Yang Melak sanak an Seleks i Peran	-		Kabup aten, SKPD	Kabu pate n, SKP D	15 Desa	15 Desa	30,000,000	18,533,800	(11,466,200)	Pendapata n Daerah	Pendapata n Daerah	0 De sa	-	b er ja la n	

			gkat Desa															
2.13.2 .13.01 .16.04	Pelaksanaan Lomba Desa	Jumlah Desa Yang Mengikuti Lomba Desa Tingkat Provinsi	Jumlah Desa Yang Mengikuti Lomba Desa Tingkat Provinsi	-		Kabupaten, SKPD	Kabupaten, SKPD	1 Desa	1 Desa	155,000,000	2,100,000	(152,900,000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 Desa	-	ber jalan	
2.13.2 .13.01 .16.02	Penyenggaraan Pemukaran Desa	Jumlah Perda Yang Dibuat Terkait Pemukaran Desa	Jumlah Perda Yang Dibuat Terkait Pemukaran Desa	-		Kabupaten, SKPD	Kabupaten, SKPD	1 Perda	1 Perda	170,000,000	83,826,200	(86,173,800)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 Perda	-	ber jalan	
-																		
0.00. 2.13. 01.06	Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD									12,000,000	11,189,000	(811,000)						
0.00.2 .13.01 .06.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran	-		Kabupaten, SKPD	Kabupaten, SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	12,000,000	11,189,000	(811,000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 Dokumen	-	ber jalan	

	an SKPD	Yang Disusun	an Yang Disusun															
0.00.2.13.01.05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan									10,000,000	3,951,000	(6,049,000)						
0.00.2.13.01.05.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Yang Disusun	Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Yang Disusun	-		Kabupaten, SKPD	Kabupaten, SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	3,951,000	(6,049,000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 Dokumen	-	berjalan	
0.00.2.13.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									963,787,650	848,255,000	(115,532,650)						
0.00.2.13.01.01.10	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Tersedia	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang	-		Kabupaten, SKPD	Kabupaten, SKPD	10 Jenis	10 Jenis	2,500,000	2,500,000	-	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 Jenis	-	berjalan	

			Terse dia															
0.00.2 .13.01 .01.01	Penye diaan Jasa Surat Meny urat	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar Yang Diagend akan	Jumla h Surat Masu k dan Surat Kelua r Yang Diage ndaka n	-		Kabup aten, SKPD	Kabu pate n, SKP D	1.717 Surat	1.717 Surat	2,800,000	900,000	(1,900,000)	Pendapata n Daerah	Pendapata n Daerah	0 Sur at	-	b er ja la n	
0.00.2 .13.01 .01.15	Penye diaan bahan bacaan dan perat uran perun dang- undan gan	Jumlah Bahan Bacaan Dan Peratura n Perunda ng- Undanga n Yang Disediak an	Jumla h Bahan Bacaan Dan Perat uran Perun dang- Undan gan Yang Disedi akan	-		Kabup aten, SKPD	Kabu pate n, SKP D	60 Eksempl ar	60 Eksempla r	6,180,000	6,180,000	-	Pendapata n Daerah	Pendapata n Daerah	0 Eks em pla r	-	b er ja la n	
0.00.2 .13.01 .01.07	Penye diaan jasa perbai kan perala tan kerja	Jumah Peralata n Kerja Yang Dipelihar a	Juma h Perala tan Kerja Yang Dipeli hara	-		Kabup aten, SKPD	Kabu pate n, SKP D	32 Unit	32 Unit	13,000,000	7,350,000	(5,650,000)	Pendapata n Daerah	Pendapata n Daerah	0 Uni t	-	b er ja la n	

0.00.2 .13.01 .01.12	Penye- diaan maka- nan dan minu- man	Jumlah Makana n dan Minuma n Yang Tersedia	Jumla h Maka- nan dan Minu- man Yang Terse- dia	-		SKPD	SKP D	2 Jenis	2 Jenis	15,675,000	12,920,000	(2,755,000)	Pendapata n Daerah	Pendapata n Daerah	0 Jenis	-	b er ja la n	
0.00.2 .13.01 .01.09	Penye- diaan baran- g cetak- an dan pengg- andaan	Jumlah Barang Cetakan Dan Penggaa- n Yang Tersedia	Jumla h Baran- g Cetak- an Dan Pengg- andaan Yang Terse- dia	-		SKPD	SKP D	4 Jenis	4 Jenis	21,150,000	13,170,000	(7,980,000)	Pendapata n Daerah	Pendapata n Daerah	0 Jenis	-	b er ja la n	
0.00.2 .13.01 .01.06	Penye- diaan jasa keber- sihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersih- an Kantor Yang Terbayar kan; Jumlah Jenis Alat Dan Bahan Pembersih Kantor	Jumla h Tenag- a Keber- sihan Kantor Yang Terba- yarkan; Jumla h Jenis Alat Dan Bahan Pemb- ersih	-		Kabup- aten, SKPD	Kabu- pate- n, SKP D	2 Orang; 0 Jenis	2 Orang; 0 Jenis	28,000,000	43,375,000	15,375,000	Pendapata n Daerah	Pendapata n Daerah	0 Or- an- g; 0 Jenis	-	b er ja la n	

			Kantor															
0.00.2 .13.01 .01.08	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Disediakan	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Disediakan	-		Kabupaten, SKPD	Kabupaten, SKPD	21 Jenis	21 Jenis	29,917,650	26,603,000	(3,314,650)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 Jenis	-	berjalan	
0.00.2 .13.01 .01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan; Jumlah Rekening Bulanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Terbayarkan	Jumlah rekening yang terbayarkan; Jumlah Rekening Bulanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Terbayarkan	-		Kabupaten, SKPD	Kabupaten, SKPD	0 Rekening; 36 Rekening	0 Rekening; 36 Rekening	58,800,000	60,200,000	1,400,000	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 Rekening; 0 Rekening	-	berjalan	

			yarkan															
0.00.2 .13.01 .01.22	Kunjungan kerja dalam daerah	Jumlah Kunjungan Kerja Dalam Daerah Yang Dilaksanakan	Jumlah Kunjungan Kerja Dalam Daerah Yang Dilaksanakan	-		Kabupaten, SKPD	Kabupaten, SKPD	375 Kali	240 Kali	80,000,000	54,096,000	(25,904,000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 Kali	-	berjalan	
0.00.2 .13.01 .01.21	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Laporan Monitoring Dan Evaluasi Yang Disusun; Jumlah Monitoring Dan Evaluasi Yang Dilakukan	Jumlah Laporan Monitoring Dan Evaluasi Yang Disusun; Jumlah Monitoring Dan Evaluasi Yang Dilakukan	-		Kabupaten, SKPD	Kabupaten, SKPD	6 Dokumen; 0 Kali	6 Dokumen; 0 Kali	100,000,000	117,481,000	17,481,000	-	-	0 Dokumen; 0 Kali	-	berjalan	

0.00.2 .13.01 .01.19	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis	Jumlah Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Yang Terbayarkan	Jumlah Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Yang Terbayarkan	-		Kabupaten, SKPD	Kabupaten, SKPD	17 Orang	18 Orang	222,000,000	234,000,000	12,000,000	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 Orang	-	berjalan	
0.00.2 .13.01 .01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Koordinasi Dan Konsultasi Luar Daerah Yang Dilaksanakan	Jumlah Koordinasi Dan Konsultasi Luar Daerah Yang Dilaksanakan	-		Kabupaten, SKPD	Kabupaten, SKPD	61 Kali	52 Kali	383,765,000	269,480,000	(114,285,000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 Kali	-	berjalan	
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																		
2.13. 2.13. 01.19	Program Peningkatan dan Pemanfaatan SDA									669,585,000	4,774,000	(664,811,000)						
2.13.2 .13.01 .19.05	Sosialisasi dan Pembentukan Pos Pelayanan	Jumlah Sosialisasi Yang Dilaksanakan Tentang Pembentukan Pos	Jumlah Sosialisasi Yang Dilaksanakan	-		Kabupaten, SKPD	Kabupaten, SKPD	11 Kali	11 Kali	59,585,000	-	(59,585,000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 Kali	-	berjalan	

	Teknologi (POSY ANTEK) dan Warung Teknologi (WARTEK)	Pelayanan Teknologi (POSYAN TEK) dan Warung Teknologi (WARTEK)	ng Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi (POSY ANTEK) dan Warung Teknologi (WARTEK)														
2.13.2 .13.01 .19.08	Pembi naan dan Penge mban gan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan	Jumlah Produk Unggulan Kawasan Perdesaan Yang Dihasilkan	Jumlah Produk Unggulan Kawasan Perdesaan Yang Dihasilkan	-		Kabupaten, SKPD	Kabupaten, SKPD	11 Produk	11 Produk	75,000,000	-	(75,000,000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 Produk	-	berjailan

2.13.2 .13.01 .19.03	Pelaksanaan Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna	Jumlah Kelompok Teknologi Tepat Guna Yang Mengikuti Lomba	Jumlah Kelompok Teknologi Tepat Guna Yang Mengikuti Lomba	-		Kabupaten, SKPD, NUHA, MALILI, WOTU, BURAU, TOWUTI, TOMONI, MANGKUTANA, ANGKALAE NA, WASUPONDA, ANGKONA, TOMONI TIMUR	Kabupaten, SKPD, WOTU, MALILI, NUHA, TOMONI, ANGKONA, WASUPONDA, KALAE NA, MANGKUTANA, TOMONI, TOWUTI, BURAU	11 Kelompok	2020-08-05	90,000,000	4,774,000	(85,226,000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	### ### ###	-	berjalan
2.13.2 .13.01 .19.01	Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat	Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna Yang Diikuti	Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna Yang	-		Kabupaten, SKPD	Kabupaten, SKPD	1 Kali	0 Kali	145,000,000	-	(145,000,000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 Kali	-	berjalan

	Nasio nal		Diikut i															
2.13.2 .13.01 .19.04	Expo Produ k Ungg ulan Kawas an Perde saan	Jumlah Expo Produk Unggula n Kawasan Perdesa an Yang Diikuti	Jumla h Expo Produ k Ungg ulan Kawa san Perde saan Yang Diikut i	-		Kabup aten, SKPD	Kabu pate n, SKP D	1 Kali	1 Kali	150,000,000	-	(150,000,000)	Pendapata n Daerah	Pendapata n Daerah	0 Kal i	-	ber ja lan	
2.13.2 .13.01 .19.06	Penin gkata n Kapsit as Pengu rus Posya ntek dan Wartek	Jumlah Penguru s Posyant ek dan Wartek Yang Ditingkat kan Kapasita snya	Jumla h Pengu rus Posya ntek dan Wartek Yang Diting katka n Kapas itasnya	-		Kabup aten, SKPD	Kabu pate n, SKP D	270 Orang	270 Orang	150,000,000	-	(150,000,000)	Pendapata n Daerah	Pendapata n Daerah	0 Or ang	-	ber ja lan	
-																		
0.00. 2.13. 01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur									9,000,000	-	(9,000,000)						

0.00.2 .13.01 .03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Aparatur Yang Mendapatkan Pakaian Hari-Hari Tertentu	Jumlah Aparatur Yang Mendapatkan Pakaian Hari-Hari Tertentu	-		Kabupaten, SKPD	Kabupaten, SKPD	36 Orang	0 Orang	9,000,000	-	(9,000,000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 Orang	-	berjalan		
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																			
2.13.2.13.01.03	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa									615,000,000	154,097,800	(460,902,200)							
2.13.2 .13.01 .03.10	Pembentukan dan Pembinaan Badan Kerjasama Antar Desa Dalam Kecamatan	Jumlah BKD dan BKAD Yang Dibentuk	Jumlah BKD dan BKAD Yang Dibentuk	-		Kabupaten, SKPD	Kabupaten, SKPD	26 Lembaga	26 Lembaga	15,000,000	-	(15,000,000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 Lembaga	-	berjalan		
2.13.2 .13.01 .03.08	Evaluasi Kinerja Lembaga Kemasyarakatan Desa Berprestasi	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa Berprestasi	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa	-		Kabupaten, SKPD	Kabupaten, SKPD	124 Lembaga Kemasyarakatan Desa	124 Lembaga Kemasyarakatan Desa	25,000,000	-	(25,000,000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 Lembaga Kemasyarakatan	-	berjalan		

	atan Desa		Berpr estasi												ata n De sa			
2.13.2 .13.01 .03.11	Pengu atan Kapas itas Kelem bagaa n Masy arakat Desa	Jumlah Pengu rus Kelemba gaan Yang Mengiku ti Penguat an Kapasita s	Jumla h Pengu rus Kelem bagaa n Yang Meng ikuti Pengu atan Kapas itas	-		Kabup aten, SKPD	Kabu pate n, SKP D	498 Orang	498 Orang	25,000,000	6,376,000	(18,624,000)	Pendapata n Daerah	Pendapata n Daerah	0 Or ang	-	b er ja la n	
2.13.2 .13.01 .03.13	Rapat Koord inasi Badan Perm usyaw arata n Desa Denga n Peme rintah	Jumlah Rapat Koordina si Badan Permusa warata n Desa Yang Dilaksan akan	Jumla h Rapat Koord inasi Badan Perm usyaw arata n Desa Yang Dilaks anaka n	-		Kabup aten, SKPD	Kabu pate n, SKP D	2 Kali	2 Kali	30,000,000	17,284,200	(12,715,800)	Pendapata n Daerah	Pendapata n Daerah	0 Kali	-	b er ja la n	

2.13.2 .13.01 .03.15	Pemb erday aan lemba ga dan organi sasi masya rakat perde saan	Jumlah Lembaga Pember dayaan Masyara kat Yang Diberika n Pembina an	Jumla h Lemb aga Pemb erday aan Masy araka t Yang Diberi kan Pemb inaan	-		Kabup aten, SKPD	Kabu pate n, SKP D	248 Lembaga	248 Lembaga	40,000,000	40,308,000	308,000	Pendapata n Daerah	Pendapata n Daerah	0 Le mb aga	-	b er ja lan	
2.13.2 .13.01 .03.01	Pembi naan kelom pok masya rakat pemb angun an desa	Jumlah Kelompo k Masyara kat Yang Mendap atkan Pembina an	Jumla h Kelo mpok Masy araka t Yang Mend apatk an Pemb inaan	-		Kabup aten, SKPD, NUHA, MALILI , WOTU, BURAU , TOWU TI, TOMO NI, MANG KUTAN A, KALAE NA, WASU POND A, ANGK ONA, TOMO NI TIMUR	Kabu pate n, SKP D, WOT U, MAL ILI, NUH A, TOM ONI TIM UR, ANG KON A, WAS UPO NDA , KAL AEN A, MA NGK UTA NA, TOM ONI,	124 Desa	124 Desa	50,000,000	-	(50,000,000)	Pendapata n Daerah	Pendapata n Daerah	0 De sa	-	b er ja lan	

						TOW UTI, BUR AU												
2.13.2 .13.01 .03.07	Keberl anjuta n Penye diaan Air Minu m dan Sanita si Berba sis Mayar akat	Jumlah Desa Yang Mendap atkan Fasilitasi Program Pamsim as	Jumla h Desa Yang Mend apatk an Fasilit asi Progr am Pamsi mas	-		Kabup aten, SKPD	Kabu pate n, SKP D	20 Desa	20 Desa	65,000,000	-	(65,000,000)	Pendapata n Daerah	Pendapata n Daerah	0 De sa	-	b er ja lan	
2.13.2 .13.01 .03.09	Bimbi ngan Manaj emen Terha dap Kader Dalam Pelaks anaan Posya ndu	Jumlah Posyand u Yang Mendap atkan Pembina an	Jumla h Posya ndu Yang Mend apatk an Pembi naan	-		Kabup aten, SKPD, NUHA, MALILI , WOTU, BURAU , TOWU TI, TOMO NI, MANG KUTAN A, KALAE NA, WASU POND A, ANGK ONA, TOMO	Kabu pate n, SKP D, WOT U, MAL ILI, NUH A, TOM ONI TIM UR, ANG KON A, WAS UPO NDA , KAL AEN	11 Posyand u	11 Posyandu	116,000,000	90,129,600	(25,870,400)	Pendapata n Daerah	Pendapata n Daerah	0 Po sya nd u	-	b er ja lan	

						NI TIMUR	A, MA NGK UTA NA, TOM ONI, TOW UTI, BUR AU											
2.13.2 .13.01 .03.12	Penin gkata n Kapas itas Badan Perm usyaw arata n Desa	Jumlah Anggota Badan Permusa warata n Desa (BPD) Yang Mengiku ti Peningk atan Kapasita s	Jumla h Angg ota Badan Perm usyaw arata n Desa (BPD) Yang Meng ikuti Penin gkata n Kapas itas	-		Kabup aten, SKPD	Kabu pate n, SKP D	250 Orang	250 Orang	124,000,000	-	(124,000,000)	Pendapata n Daerah	Pendapata n Daerah	0 Or an g	-	b er ja la n	
2.13.2 .13.01 .03.06	Penin gkata n Kapas ita SDM Dalam Pengu atan Kelem bagaa	Jumlah Desa Yang Mendap atkan Pendam pingan Dalam Penyusu nan	Jumla h Desa Yang Mend apatk an Penda mping an Dala	-		Kabup aten, SKPD	Kabu pate n, SKP D	25 Desa	0 Desa	125,000,000	-	(125,000,000)	Pendapata n Daerah	Pendapata n Daerah	0 De sa	-	b er ja la n	

	n Lokal	Peraturan Desa	m Penyunan Peraturan Desa															
2.13.2.13.01.05	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan								667,345,000	390,220,000	(277,125,000)							
2.13.2.13.01.05.04	Monitoring Evaluasi dan Pembinaan Kelemagaan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok PKK Yang Dimonitoring dan Dievaluasi	Jumlah Kelompok PKK Yang Dimonitoring dan Dievaluasi	-		Kabupaten, SKPD	Kabupaten, SKPD	139 Kelompok	139 Kelompok	100,000,000	44,006,000	(55,994,000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 Kelompok	-	berjalan	
2.13.2.13.01.05.02	Pemberdayaan Kelemagaan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok Pemberdayaan Keluarga Yang Mendapatkan Penyuluhan dan Pembinaan	Jumlah Kelompok Pemberdayaan Keluarga Sejahtera Yang Mendapatkan Penyuluhan dan	-		Kabupaten, SKPD	Kabupaten, SKPD	139 Kelompok	139 Kelompok	267,345,000	266,564,000	(781,000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 Kelompok	-	berjalan	

			Pembi naan															
2.13.2 .13.01 .05.03	Penin gkata n Deraj at Pendi dikan dan Keter ampil an Pere mpua n dan Kelu ar ga	Jumlah Kelompo k Kelemba gaan Peremp uan Yang Mendap atkan Pelatiha n dan Pendidik an	Jumla h Kelo mpok Kelem bagaa n Pere mpua n Yang Mend apatk an Pelati han dan Pendi dikan	-		Kabup aten, SKPD	Kabu pate n, SKP D	139 Kelompo k	139 Kelompok	300,000,000	79,650,000	(220,350,000)	Pendapata n Daerah	Pendapata n Daerah	0 Kel om po k	-	b er ja la n	
2.13. 2.13. 01.02	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan									345,000,000	38,301,000	(306,699,000)						
2.13.2 .13.01 .02.11	penda mping an P2MP	Jumlah Desa Yang Dilakuka n Pendam pingan Dan Evaluasi	Jumla h Desa Yang Dilaku kan Penda mping an Dan	-		Kabup aten, SKPD	Kabu pate n, SKP D	99 Desa	99 Desa	30,000,000	26,921,000	(3,079,000)	Pendapata n Daerah	Pendapata n Daerah	0 De sa	-	b er ja la n	

			Evaluasi															
2.13.2 .13.01 .02.10	pendampingan teknis dan akses pemasaran BUM DESA	Jumlah BUMDESA Yang Mendapatkan Pendampingan Teknis Dan Akses Pemasaran BUMDESA	Jumlah BUM DESA Yang Mendapatkan Pendampingan Teknis Dan Akses Pemasaran BUM DESA	-		Kabupaten, SKPD, NUHA, MALILI, BURAU, TOWUTI, BURAU, MALILI, TOMONI, NUHA, MANGKUTANA, KALAEANA, ANGKONA, TOMONI TIMUR	Kabupaten, SKPD, TOWUTI, BURAU, MALILI, NUHA, TOMONI TIMUR, ANGKONA, KALAEANA, MANGKUTANA, TOMONI	124 BUMDESA	124 BUMDESA	35,000,000	11,380,000	(23,620,000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 BUMDESA	-	berjalan	
2.13.2 .13.01 .02.08	Bantuan Modal Bagi Badan Usaha Milik Desa	Jumlah BUMDESA Sehat Yang Diberikan Bantuan Modal	Jumlah BUM DES Sehat Yang Diberikan Bantuan	-		Kabupaten, SKPD	Kabupaten, SKPD	2 BUMDESA	0 BUMDESA	100,000,000	-	(100,000,000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 BUMDESA	-	berjalan	

			an Moda l															
2.13.2 .13.01 .02.02	Pelati han ketra mpila n manaj emen badan usaha milik desa	Jumlah Penguru s BUMDes a Yang Mengiku ti Pelatiha n	Jumla h Pengu rus BUM Desa Yang Meng ikuti Pelati han	-		Kabup aten, SKPD, NUHA, MALILI , WOTU, BURAU , TOWU TI, TOMO NI, MANG KUTAN A, KALAE NA, WASU POND A, ANGK ONA, TOMO NI TIMUR	Kabu pate n, SKP D, WOT U, MAL ILI, NUH A, TOM ONI TIM UR, ANG KON A, WAS UPO NDA , KAL AEN A, MA NGK UTA NA, TOM ONI, TOW UTI, BUR AU	124 Orang	0 Orang	180,000,000	-	(180,000,000)	Pendapata n Daerah	Pendapata n Daerah	0 Or ang	-	b er ja lan	

2.13.2.13.01.04.05	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa								700,000,000	203,236,000	(496,764,000)							
2.13.2.13.01.04.05	Pelatihan aparat desa bidang tata kelola pemerintahan desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa Yang Mengikuti Pelatihan Dalam Bidang Tata Kelola Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa Yang Mengikuti Pelatihan Dalam Bidang Tata Kelola Pemerintahan Desa	-		Kabupaten, SKPD	Kabupaten, SKPD	55 Orang	55 Orang	-	-	-	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 Orang	-	berjalan	
2.13.2.13.01.04.02	Pelatihan aparat desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa Yang Mengikuti Pelatihan Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa Yang Mengikuti Pelatihan Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan	-		Kabupaten, SKPD	Kabupaten, SKPD	124 Orang	124 Orang	-	-	-	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 Orang	-	berjalan	

			gan Desa															
2.13.2 .13.01 .04.09	Pelatihan aparat desa bidang penyusunan peraturan desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa Yang Mengikuti Pelatihan Dalam Penyusunan Peraturan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa Yang Mengikuti Pelatihan Dalam Penyusunan Peraturan Desa	-		Kabupaten, SKPD	Kabupaten, SKPD	124 Orang	124 Orang	-	-	-	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 Orang	-	berjalan	
2.13.2 .13.01 .04.01	Pelatihan aparat pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa Yang Mengikuti Pelatihan Dalam Bidang Pembangunan Kawasan	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa Yang Mengikuti Pelatihan Dalam Bidang	-		Kabupaten, SKPD	Kabupaten, SKPD	40 Orang	40 Orang	100,000,000	-	(100,000,000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 Orang	-	berjalan	

	perdesaan	Perdesaan	g Pembangunan Kawasan Perdesaan															
2.13.2 .13.01 .04.03	Pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa Yang Mengikuti Pelatihan Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa Yang Mengikuti Pelatihan Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	-		Kabupaten, SKPD	Kabupaten, SKPD	124 Orang	46 Orang	200,000,000	203,236,000	3,236,000	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 Orang	-	berjalan	

2.13.2 .13.01 .04.07	Pelatihan aparat desa biang perencanaan pembangunan desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa Yang Mengikuti Pelatihan Dalam Bidang Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa Yang Mengikuti Pelatihan Dalam Bidang Perencanaan Pembangunan Desa	-		SKPD, TOMONI, MANGKUTANA, KALAEWA, WASUPONDA, ANGKONA, TOMONI TIMUR, WASUPONDA, KALAEWA, MANGKUTANA, TOMONI, TOWUTI, BURAU	SKPD, WOTU, MALILI, NUHA, TOMONI, ANGKONA, WASUPONDA, KALAEWA, MANGKUTANA, TOMONI, TOWUTI, BURAU	124 Orang	0 Orang	200,000,000	-	(200,000,000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 Orang	-	berjalan
2.13.2 .13.01 .04.10	Pelatihan aparat desa bidang penataan aset desa	Jumlah aparat desa yang dilatih dalam bidang penataan aset desa	Jumlah aparat pemerintah desa yang dilatih dalam bidang penataan aset desa	-		Kabupaten, SKPD	Kabupaten, SKPD	124 Orang	0 Orang	200,000,000	-	(200,000,000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 Orang	-	berjalan

	Kantor	Diadakan	Kantor Yang Diadakan																
0.00.2.13.01.04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								120,000,000	35,239,000	(84,761,000)								
0.00.2.13.01.04.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Bimtek, Diklat, Workshop, Seminar Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Bimtek, Diklat, Workshop, Seminar Perundang-Undangan	-		Kabupaten, SKPD	Kabupaten, SKPD	17 Orang	17 Orang	120,000,000	35,239,000	(84,761,000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 Orang	-	berjalan		
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																			
2.13.01.17	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa								320,410,000	268,806,600	(51,603,400)								

2.13.2 .13.01 .17.02	Penda mping an Penyu sunan Pelaks anaan Kegiat an Desa (LKPP D dan LKPJ Desa)	Jumlah Desa Yang Membua t LKPPD dan LKPJ Desa Tepat Waktu	Jumla h Desa Yang Mem buat LKPP D dan LKPJ Desa Tepat Wakt u	-		Kabup aten, SKPD, NUHA, MALILI , WOTU, BURAU , TOWU TI, TOMO NI, MANG KUTAN A, KALAE NA, WASU POND A, ANGK ONA, TOMO NI TIMUR	Kabu pate n, SKP D, WOT U, MAL ILI, NUH A, TOM ONI TIM UR, ANG KON A, WAS UPO NDA , KAL AEN A, MA NGK UTA NA, TOM ONI, TOW UTI, BUR AU	124 Desa	124 Desa	40,000,000	13,700,000	(26,300,000)	Pendapata n Daerah	Pendapata n Daerah	0 De sa	-	b er ja la n	
2.13.2 .13.01 .17.03	Fasilit asi Penyu sunan RPJM Desa	Jumlah Desa Yang Menyus un RPJM Desa Tepat Waktu	Jumla h Desa Yang Meny usun RPJM Desa Tepat	-		Kabup aten, SKPD	Kabu pate n, SKP D	54 Desa	54 Desa	50,000,000	55,593,800	5,593,800	Pendapata n Daerah	Pendapata n Daerah	0 De sa	-	b er ja la n	

			Waktu															
2.13.2 .13.01 .17.05	Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Desa	Jumlah Rapat Koordinasi Yang Dilakukan	Jumlah Rapat Koordinasi Yang Dilakukan	-		Kabupaten, SKPD, NUHA, MALILI, WOTU, BURAU, TOWUTI, TOMONI, MANGKUTANA, KALAE NA, WASUPONDA, ANGKONA, TOMONI TIMUR	Kabupaten, SKPD, WOTU, MALILI, NUHA, TOMONI TIMUR, ANGKONA, WASUPONDA, KALAE NA, MANGKUTANA, TOMONI, TOWUTI, BURAU	4 Kali	2 Kali	60,000,000	25,534,800	(34,465,200)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 Kali	-	berjalan	

2.13.2 .13.01 .17.01	Penda mping an Penyu sunan Peren canaa n Tahun an Desa (RKP Desa)	Jumlah Desa Yang Menyus un Perenca naan Tahunan Desa (RKP Desa) Tepat Waktu	Jumla h Desa Yang Meny usun Peren canaa n Tahun an Desa (RKP Desa) Tepat Wakt u	-		Kabup aten, SKPD, NUHA, MALILI , WOTU, BURAU , TOWU TI, TOMO NI, MANG KUTAN A, KALAE NA, WASU POND A, ANGK ONA, TOMO NI TIMUR	Kabu pate n, SKP D, WOT U, MAL ILI, NUH A, TOM ONI TIM UR, ANG KON A, WAS UPO NDA , KAL AEN A, MA NGK UTA NA, TOM ONI, TOW UTI, BUR AU	124 Desa	124 Desa	60,410,000	57,344,400	(3,065,600)	Pendapata n Daerah	Pendapata n Daerah	0 De sa	-	b er ja la n	
2.13.2 .13.01 .17.06	Penyu sunan Regul asi Tenta ng Desa	Jumlah Peratura n- Peratura n Daerah Yang Ditetapk an Terkait	Jumla h Perat uran- Perat uran Daera h Yang Diteta	-		Kabup aten, SKPD	Kabu pate n, SKP D	5 Peratura n	5 Peraturan	110,000,000	116,633,600	6,633,600	Pendapata n Daerah	Pendapata n Daerah	0 Per atu ran	-	b er ja la n	

		Tentang Desa	pkian Terkait Tentang Desa																
2.13.2.13.01.15.02	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa								170,000,000	49,599,000	(120,401,000)								
2.13.2.13.01.15.02	Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa	Jumlah Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Yang Disusun	Jumlah Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Yang Disusun	-		Kabupaten, SKPD	Kabupaten, SKPD	3 Pedoman	3 Pedoman	70,000,000	-	(70,000,000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 Pedoman	-	berjalan		
2.13.2.13.01.15.01	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes	Jumlah Desa Yang Tepat Waktu Dalam Menyusun Peraturan Desa Tentang APBDes	Jumlah Desa Yang Tepat Waktu Dalam Menyusun Peraturan Desa Tentang APBDes	-		Kabupaten, SKPD, NUHA, MALILI, WOTU, BURAU, TOWU, TOMONI, MANGKUTANA, WASUPONDA,	Kabupaten, SKPD, WOTU, MALILI, NUHA, TOMONI, TIMUR, ANKONA, WASUPONDA	124 Desa	124 Desa	100,000,000	49,599,000	(50,401,000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 Desa	-	berjalan		

						ANGK ONA, TOMO NI TIMUR	, KAL AEN A, MA NGK UTA NA, TOM ONI, TOW UTI, BUR AU												
	JUMLAH								5,209,127,65 0	2,326,828,40 0	(2,882,299,250)								

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 merupakan dokumen formal, yang mempunyai keterkaitan dengan Rencana Strategik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016- 2021 yang merupakan rencana bersifat umum berjangka waktu 5 tahun, dan harus diuraikan lebih lanjut ke dalam rencana tahunan agar program dan kegiatan lebih terfokus. Renja Perubahan 2020 memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2020 dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Disamping itu Renja ini disusun guna memenuhi maksud INPRES No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Demikian Rencana Kinerja ini dibuat agar seluruh jajaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur dapat menghayati dan menjadi acuan dalam melaksanakan setiap kegiatan dan tugas-tugas yang dilaksanakan sesuai yang direncanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.



Madi, Agustus 2020

KEPALA DINAS,

HALSEN, S.IP,MM

Pangkat : Pembina TK I /Vb

NIP. 19720424 199203 1 004